



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh setiap negara merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yaitu meliputi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan. Pembangunan nasional ini dilakukan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dan mewujudkan tujuan dari negara itu sendiri. Pembangunan nasional pada tiap negara akan dapat terwujud dengan kerjasama dari masyarakat. Selain kerjasama masyarakat, pembangunan daerah juga turut berperan dan merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari keberhasilan suatu daerah untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan daerah sebagai suatu kesatuan wilayah kehidupan setiap individu maupun anggota masyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mensyaratkan adanya dukungan personil, peralatan, dan pembiayaan (keuangan) yang cukup memadai. Dengan dipenuhinya tiga syarat diatas, maka pemerintah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal maka diberlakukan perimbangan keuangan daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Dengan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, seperti diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6.

Dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2, dijelaskan bahwa dana perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 3 dijelaskan bahwa dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pembangunan. Menurut Soemitro (2000) dalam Jaya dan Widanta (2014) pembangunan dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat,

kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam rangka itu pembangunan harus dipandang sebagai salah satu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri, dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata.

Sejalan dengan hal tersebut, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan yang terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintah negara.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka semakin kecil tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, baik dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum (*block grant*) maupun dana alokasi khusus (*specific grant*). Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, lalu dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sebaliknya jika semakin rendah kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD maka semakin besar ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah cenderung dominan. Kondisi ideal dimana Pendapatan Asli Daerah mampu membiayai total pengeluaran dalam APBD, ternyata belum dapat dicapai oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. (Simanjuntak, 2002)

Prakosa (2004) mengatakan bahwa, dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat tersebut, bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama untuk membiayai belanja daerah. Tujuan transfer ini adalah mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal selain melalui dana bagi hasil, yaitu dengan meningkatkan pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Seiring dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka daerah harus mengoptimalkan peran Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten. Berikut adalah Pendapatan Asli Daerah provinsi Banten pada tahun 2010 sampai dengan 2013:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Kabupaten Pandeglang	31.897.330.000	56.189.200.000	54.048.390.000	80.584.080.000
Kabupaten Lebak	64.752.567.786	93.063.712.429	127.294.755.924	136.180.145.486
Kabupaten Tangerang	350.295.783.693	665.231.220.000	882.788.661.937	1.035.784.283.649
Kabupaten Serang	138.817.369.517	216.958.155.419	265.582.038.963	371.597.552.721
Kota Tangerang	230.634.138.004	499.600.000.000	631.519.000.000	815.733.000.000
Kota Cilegon	115.410.832.318	253.212.004.831	331.861.814.250	291.943.585.049
Kota Serang	26.535.750.000	41.890.330.000	67.274.638.200	65.376.087.425
Kota Tangsel	131.500.021.000	420.663.049.000	576.304.771.005	728.965.301.483

sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa pendapatan pada setiap kabupaten dan kota yang ada pada provinsi Banten memiliki nilai yang berfluktuasi. Misalnya pada tahun 2013 nilai Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten Tangerang memiliki nilai tertinggi sedangkan kota Serang Pendapatan Asli Daerahnya memiliki nilai terendah dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Pendapatan Asli Daerah tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Tangerang lebih mandiri dibandingkan kota Serang. Kabupaten Tangerang lebih dapat mengurus

kebutuhan pada daerahnya dan meminimalkan ketergantungan akan pemerintah pusat. Sebaliknya jumlah Pendapatan Asli Daerah pada kota Serang menunjukkan bahwa kemandiriannya cukup rendah sehingga kota Serang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam mengurus kebutuhan pada daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah mempunyai beberapa komponen di dalamnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan, dan laba dari penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Sedangkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berasal dari hasil penjualan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Komponen Pendapatan Asli Daerah pada setiap kabupaten atau kota pada provinsi Banten tentu memiliki nilai yang berbeda, berikut adalah tabel komponen penghasilan asli kabupaten/kota di provinsi Banten pada tahun 2013:

Tabel 1.2
Komponen Pendapatan Asli Daerah

Provinsi/Kota	Luas wilayah	penduduk	Tahun 2013			
			pajak daerah	retribusi daerah	hasil pengelolaan daerah yg dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah
Kabupaten Pandeglang	2747 km ²	1,183,006	20.047.660.000	39.273.100.000	7.550.460.000	13.712.860.000
Kabupaten Lebak	3427 km ²	1,247,906	20.943.040.987	100.090.890.962	2.843.366.827	12.302.846.710
Kabupaten Tangerang	959.6 km ²	3,157,780	800.441.163.804	111.145.905.011	48.634.584.609	75.562.630.225
Kabupaten Serang	1734 km ²	1,450,894	198.727.500.000	33.806.530.350	9.204.938.400	129.858.583.971
Kota Tangerang	164.5 km ²	1,952,396	643.426.000.000	103.524.000.000	8.302.000.000	60.479.000.000
Kota Cilegon	175.5 km ²	398,304	177.144.972.228	25.464.239.480	11.141.337.962	78.193.035.379
Kota Serang	267 km ²	618,802	45.129.979.193	10.539.095.627		9.707.012.605
Kota Tangsel	164.5 km ²	1,443,403	607.251.022.635	92.366.248.545		29.348.030.303

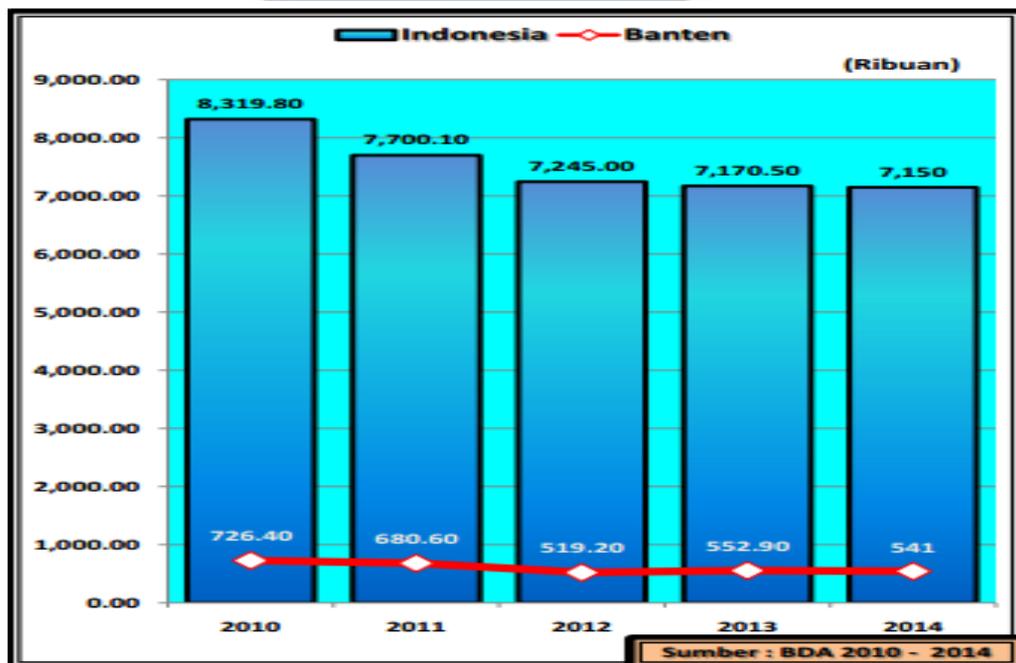
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, Kota Tangerang, Cilegon, Serang, Tangerang Selatan Dalam Angka 2014.

Berdasarkan Tabel 1.2, komponen Pendapatan Asli Daerah pada setiap kabupaten/kota memiliki kontribusi yang berbeda-beda misalnya seperti di kabupaten Pandeglang nilai retribusi daerah sebesar 39.273,1 juta rupiah, lebih besar kontribusinya dibandingkan dengan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sama halnya dengan kabupaten Lebak nilai kontribusi retribusi daerah dalam Pendapatan Asli Daerah lebih besar dibandingkan dengan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu sebesar 100.090,9 juta rupiah. Berbeda dengan kabupaten Tangerang, kabupaten Serang, kota Tangerang, kota Cilegon, kota Serang, dan kota Tangerang Selatan yang nilai kontribusi pajak daerah lebih besar dibandingkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 800.441,2 juta

rupiah, 198.727,5 juta rupiah, 643.426 juta rupiah, 177.145 juta rupiah, 45.130 juta rupiah, dan 607.251,1 juta rupiah.

Banten adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan, serta wilayah paling barat di pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari provinsi Jawa Barat, namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 dengan pusat pemerintahan ada pada kota Serang. Provinsi Banten memiliki perekonomian yang berkembang, ditunjukkan dengan tingkat pengangguran yang semakin menurun dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada Gambar 1.1:

Gambar 1.1
Jumlah Pengangguran Provinsi Banten



Sumber: Banten Dalam Angka 2010-2014

Pada Gambar 1.1, jumlah pengangguran di provinsi Banten pada tahun 2010 ditunjukkan dengan 726.400 orang, kemudian jumlah pengangguran terus

mengalami penurunan menjadi 680.600 orang pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 menjadi 519.200. Pada tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan menjadi 552.900 orang dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2014 menjadi 541.000 orang. Walaupun penurunan pada jumlah pengangguran tidak begitu signifikan namun provinsi Banten berhasil menjaga jumlah pengangguran agar tetap stabil dan tidak terjadi peningkatan. Hal ini dapat terjadi karena dukungan investasi yang masuk ke provinsi Banten sehingga tercipta lapangan kerja yang semakin banyak dan investasi tersebut mampu menyerap tenaga kerja dengan demikian dapat menekan jumlah pengangguran yang ada di provinsi Banten. Adapun investasi asing yang masuk ke provinsi Banten mengalami peningkatan pada setiap tahunnya seperti pada Tabel 1.3:

Tabel 1.3
Investasi Asing Provinsi Banten (US\$ juta)

PROVINSI	2010		2011		2012		2013	
	jumlah proyek	nilai investasi						
BANTEN	280	1.544,2	361	2.171,7	405	2.716,3	592	3.720,2

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa investasi asing yang masuk pada provinsi Banten terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 proyek pada provinsi Banten sebanyak 280 proyek dengan nilai investasi US\$ 1.544,20 juta. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 2011 dengan 361 proyek dan nilai investasi US\$ 2.171,70 juta, pada 2012 dengan 405 proyek dan nilai investasi US\$ 2.716,30 juta, serta pada 2013 dengan 592 proyek dan nilai investasi US\$ 3.702,20 juta.

Selain jumlah pengangguran dan investasi, penelitian ini dilakukan di provinsi Banten karena perkembangan total Pendapatan Asli Daerah dari setiap kabupaten maupun kota mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2013. Dengan peningkatan pada pendapatan tiap daerah tersebut membuat provinsi Banten semakin berkembang dan maju. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kontribusi pendapatan tiap daerah dalam membangun negara yang jauh lebih berkembang dan maju, mengetahui tingkat kemandirian atau ketergantungan pada daerah terhadap pemerintah pusat serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional dalam hal perekonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati dari beberapa indikator makro, salah satunya pada peningkatan produksi barang dan jasa suatu daerah, diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah. Dengan meningkatnya PDRB, maka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat, sehingga akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya dan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Sukirno, 2006 dalam Jaya dan Widanta, 2014).

Selain faktor PDRB yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah, ada juga jumlah penduduk yang merupakan unsur penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kemakmuran masyarakat yang berarti posisi penduduk dalam hal ini bukan hanya sebagai objek pembangunan yang menikmati tetapi juga berperan aktif. Penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan selanjutnya akan mendorong *economies of scale*, yaitu dengan meningkatnya jumlah *output* yang diproduksi maka biaya pada produksi akan semakin kecil sehingga keuntungan akan semakin besar. Namun penambahan penduduk juga memiliki dampak negatif, misalnya dengan meningkatnya jumlah kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana bagi kebutuhan masyarakat. Apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima akan meningkat karena adanya jumlah penduduk yang produktif di dalam perekonomian (Adriani dan Handayani, 2008).

Sektor pariwisata merupakan sektor yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam pembangunan perekonomian suatu daerah dalam hal ini yaitu

provinsi Banten. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Untuk melihat perkembangan sektor pariwisata di provinsi Banten dapat ditunjukkan dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri pada tempat rekreasi, hiburan, restoran, hotel dan sebagainya yang berkaitan dengan usaha pariwisata. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah pajak dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (Lia, 2013).

Selain PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan, ada juga pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah adalah pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan seperti membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan, kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Dengan tersedianya pelayanan dan pembangunan infrastruktur dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Ketika kesejahteraan meningkat, maka secara otomatis kemampuan masyarakat untuk membayar pajak juga akan meningkat, yang nantinya berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Tobing, 2015).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jaya dan Widanta (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian ini menambahkan variabel pengeluaran pemerintah daerah oleh Tobing (2015), sedangkan Jaya dan Widanta (2014) menggunakan variabel independen produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan.
2. Objek penelitian sebelumnya adalah di kota Denpasar. Pada penelitian ini objek penelitian adalah di Provinsi Banten.
3. Tahun penelitian ini adalah untuk periode 2010-2013, sedangkan penelitian yang sebelumnya adalah untuk periode 1997-2011.

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten”**

1.2 Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah yang digunakan agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus adalah analisis hanya membatasi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga berlaku berdasarkan Lapangan Usaha, Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan, Pengeluaran Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah periode 2010-2013. Serta penelitian ini hanya dilakukan di Provinsi Banten, menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah jumlah penduduk mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah jumlah wisatawan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah pengeluaran pemerintah daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Masyarakat

Sebagai informasi pengetahuan masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

2. Pemerintah Daerah

Sebagai informasi tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi serta cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Peneliti lainnya

Untuk menambah informasi penelitian yang berguna untuk pihak yang membutuhkan dalam penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah serta informasi yang lebih mendalam mengenai Pendapatan Asli Daerah.

4. Penulis sendiri

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi secara ringkas yang menggambarkan isi dari skripsi dan mengenai gambaran umum permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan antara lain latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar dilakukannya penelitian. Bab ini menjelaskan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah, produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, jumlah wisatawan, dan pengeluaran pemerintah daerah secara konsep maupun pengertian secara operasional. Telaah literatur ini sangat penting karena merupakan pijakan yang menjadi dasar penelitian dan membuat hipotesa sementara.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran objek yang akan diteliti oleh penulis dan hal-hal yang terkait dengan penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk menguji serta penjelasan mengenai pemakaian variabel yang akan diuji oleh penulis, skala pengukuran dan perhitungan yang akan

digunakan oleh penulis, teknik pengambilan data, bagaimana penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan, teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh penulis untuk meneliti objek yang sudah ditentukan, serta metode analisis yang digunakan untuk mengatur hasil penelitian seperti rumus-rumus statistik, dan *software* yang digunakan sebagai alat bantu untuk penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, pengujian statistik dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian yang diuji oleh peneliti serta saran yang diberikan dengan upaya untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi.

U M M N
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA